

# Peran Pustakawan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah

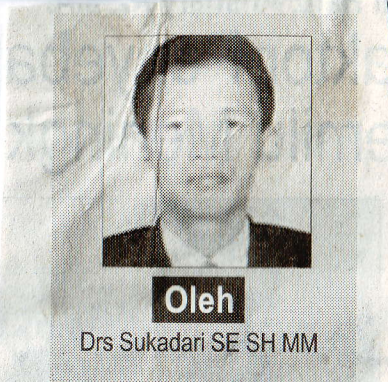
**K**EBERADAAN perpustakaan sekolah sebagai salah satu sumber belajar, secara umum masih sangat diperhatikan. Penyebabnya yakni tidak adanya pengelolaan perpustakaan yang memiliki kualifikasi pendidikan kepustakawanan yang memadai. Keprihatinan terhadap kondisi perpustakaan itu terjadi di sekolah pada umumnya.

Harian Kedaulatan Rakyat (14-09-2001, halaman 4) menyebutkan bahwa 536 SD di Kabupaten Bantul dan 550 SD di Kabupaten Gunung Kidul tidak satupun yang memiliki perpustakaan standar, bahkan banyak yang sama sekali tidak memiliki perpustakaan. Harian Kompas terbitan 15 November 2000 menyebutkan bahwa dari sekitar 200.000 Sekolah Dasar di Indonesia, hanya satu persen yang memiliki perpustakaan standar, sementara dari kurang lebih 70.000 SLTP yang ada, hanya 36 persen saja yang mempunyai perpustakaan standar. Untuk tingkat SLTA, dari 70.000 yang ada, sekitar 54 persen saja yang memiliki perpustakaan standar. Sedangkan dari 4.000 perguruan tinggi, hanya 60 persen yang mempunyai perpustakaan standar.

Masih dari Harian Kompas terbitan 2 September 2002 menyebutkan hanya ada 5 persen saja dari sekitar 300.000 SD-SLTA di seluruh Indonesia yang memiliki perpustakaan dengan kondisi cukup bagus, namun belum terintegrasi dengan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu banyak sekolah yang belum menyelenggarakan perpustakaan. Keberadaan dan aktivitas perpustakaan sekolah sangat tergantung dari sikap kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan dalam segala hal.

Jika perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar mengajar, sekaligus merupakan representasi dan kelanjutan dari budaya baca dan tulis, maka pembangunan perpustakaan harus menentu dengan pengembangan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perpustakaan sekolah harus didukung dengan tenaga yang handal dan paham tentang kegiatan belajar mengajar.

Mengingat pentingnya perpustakaan sebagai unit penunjang kegiatan belajar mengajar, program sertifikasi per-



Oleh

Drs Sukadari SE SH MM

pustakaan bagi guru pustakawan merupakan sebuah alternatif yang sangat diharapkan membantu akselerasi pemberdayaan sekolah melalui peran perpustakaan. Intinya adalah bagaimana perpustakaan dapat diberdayakan secara optimal dalam mendukung proses belajar mengajar. Dengan demikian, proses belajar mengajar tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga berpusat pada informasi (berbagai ilmu pengetahuan) yang disediakan oleh perpustakaan.

Sudah merupakan patokan dasar bahwa setiap penyelenggaraan pendidikan maka perpustakaan sebagai unit penunjang pendidikan harus selalu menjadi pendamping dalam usaha memberikan kemudahan kepada siswa terhadap akses informasi yang dijadikan rujukan siswa dan guru pustakawan sekolah dalam mendalami materi pendidikannya. Keberadaan perpustakaan semakin penting dalam usaha menyediakan fasilitas kepada siswa dan guru pustakawan sekolah dalam upaya pengayaan materi dan memberikan keleluasaan dalam melakukan belajar mandiri.

Mengingat pentingnya perpustakaan sebagai unit penunjang pendidikan, maka program sertifikasi guru pustakawan sekolah dalam peningkatan sistem dan metrik pengajaran berbasis pada perpustakaan. Program sertifikasi guru pustakawan sangat diharapkan membantu akselerasi pemberdayaan sekolah melalui peran perpustakaan. Intinya adalah bagaimana perpustakaan dapat diberdayakan secara optimal dalam mendukung proses belajar-mengajar. Dengan

demikian, proses belajar mengajar tidak hanya berpusat pada guru pustakawan tetapi juga berpusat pada informasi yang disediakan oleh perpustakaan.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah sejak tahun 2002 menganjurkan agar sekolah mengikuti kurikulum berbasis kompetensi. Dalam pola ini guru pustakawan sekolah tidak lagi menjadi tokoh sentral di ruang kelas, namun lebih sebagai fasilitator. Dengan demikian, peran perpustakaan menjadi sangat penting dalam wacana ini. Namun yang menjadi masalah utama yang harus dihadapi sekolah adalah kurangnya sumberdaya dalam mengelola perpustakaan. Guna memberikan alternatif untuk mengatasi masalah sumberdaya, ada dua pilihan yakni menyiapkan tenaga pustakawan untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yaitu tenaga pustakawan sekolah dan atau pustakawan guru pustakawan sekolah.

Kendala lain yakni tidak adanya kesepahaman mengenai fakultas di perguruan tinggi yang harus menangani program studi pustakawan sekolah dan atau pustakawan guru pustakawan sekolah, apakah akan diselenggarakan di fakultas kependidikan atau fakultas sastra yang menyelenggarakan program pendidikan Ilmu Perpustakaan.

Negara (APBN) tidak seperti Pemilu 2004 yang juga berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kedua, sosialisasi Pemilu 2009 tidak hanya dilakukan oleh KPU, KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota sebab sesuai amanat UU No 22 Tahun 2007 juga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Ketiga, PPS harus mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih. Keempat, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berkewajiban menyerahkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi peserta pemilu dan juga petugas pengawas lapangan, diumpamakan kalau jumlah partai peserta pemilu sampai 50 harus di berikan semua kepada saksinya kemudian dikalikan sekian jumlah TPS dan sekian lembar DPT akan memakan biaya yang banyak dalam penyediaan DPT tersebut.

untuk mengisi waktu senggang atau rekreasi.

Fungsi Perpustakaan secara umum adalah :

#### 1. Sumber Kebudayaan

Perpustakaan adalah tempat pengumpulan bahan pustaka yang merupakan budidaya manusia dari seluruh dunia, yakni percampuran kebudayaan antar bangsa untuk mempertinggi kebudayaan nasional agar tidak kehilangan jati diri bangsa.

#### 2. Sumber Pendidikan

Perpustakaan berfungsi sebagai tempat penyedia berbagai macam informasi, tentang ilmu pengetahuan yang dapat memengaruhi perkembangan pengetahuan pribadi seseorang, maka memiliki fungsi yang sangat strategis.

#### 3. Sumber Penerangan

Perpustakaan merupakan tempat kumpulan berbagai macam bahan pustaka untuk penerangan (informasi) bagi pengguna yang memerlukan untuk dipelajari.

#### 4. Sumber Dokumentasi

Perpustakaan berfungsi sebagai tempat menyimpan dokumen baik verbal maupun non verbal guna melayani kepentingan penyelidikan atau penelitian.

#### 5. Sumber Rekreasi

Perpustakaan berfungsi sebagai tempat rekreasi karena perpustakaan menyediakan buku-buku yang tidak menjemukan seperti buku cerita (novel, puisi, dll).

6. Perpustakaan berfungsi sebagai tempat yang dapat menumbuhkan pikiran pikiran baru (inspirasi), karena perpustakaan menyediakan berbagai macam pikiran manusia yang berbentuk buku untuk dipahami dan dikembangkan.

#### Solusi Pemerintah Dalam Mengangkat Pustakawan

Bergulirnya otonomi daerah yang semakin mantap, maka kewenangan pemerintah daerah menjadi semakin penting. Budaya membaca adalah kunci utama suksesnya pendidikan, anak didik merasa antusias untuk belajar bila sarana maupun prasarana membaca memadai.

Pemerintah daerah yang memiliki otoritas bagi wilayahnya, hendaknya peduli dan tanggap terhadap sekolah

yang menjadi tanggungjawabnya. Bila akhir-akhir ini popularitas dunia pendidikan menjadi buah bibir masyarakat pada umumnya yaitu adanya sertifikasi guru, pembahasan BHP, pelaksanaan UNAS dan sebagainya, akan tetapi perpustakaan dan pustakawannya tidak banyak disentuh padahal persoalan ini sangat vital dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Kalau pemerintah mengangkat guru Bantu dan honorer kenapa tidak juga mengangkat tenaga pustakawan sebagai PNS di sekolah. Di samping itu dapat juga dengan cara lain memfungsikan dan mengoptimalkan bagi PNS yang mungkin terjadi kelebihan di suatu instansi pemerintah untuk dididik sebagai tenaga pustakawan.

Menurunnya jumlah murid di beberapa sekolah berakibat mergernya sekolah tersebut, tentu berdampak pada kelebihan guru, maka bagi guru yang kekurangan atau tidak mendapatkan jam seyogyanya dialih tugaskan sebagai tenaga pustakawan dengan konsentrasi terdidik terlebih dulu sebagai calon tenaga pustakawan serta tunjangan yang banyak.

Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tingkat Sekolah Dasar hamper tidak ada tenaga pustakawan sedang anak-anak usia ini sangat membutuhkan sumber belajar yang memadai.

Untuk mewujudkan peran pustakawan yang professional di sekolah diperlukan kepedulian semua pihak, utamanya adalah pemerintah yang memiliki kebijakan dalam menentukan program pembangunan secara universal, jika semua ini dapat direalisasikan dengan baik, tidak mustahil bangsa ini mampu bersaing di era global melalui anak-anak yang telah dibekali sejak dini dengan ilmu pengetahuan yang sumbernya adalah buku-buku di perpustakaan yang memadai dan ditangani tenaga pustakawan yang professional.

*Penulis adalah Ketua II STKIP Catur Sakti Yogyakarta dan Dosen Negeri DPK STKIP Catur Sakti Yogyakarta serta sedang menyelesaikan studi Program Doktor (S3) Prodi Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.*